



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041 Palima – Serang

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR: 060/Kep. 053 - Inspektorat /2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Perda Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 16);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Operasional pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II perlu mendapat perhatian dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Februari 2023



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700320 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Wakil Gubernur Banten;
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Lampiran I Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Banten

Nomor : 060/053 - Inspektorat /2023

Tanggal : 2 Februari 2023

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	METADATA INDIKATOR (DO)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	Tahun
						2023
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			persen	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	$(\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter}) / (\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun}) \times 100$	persen	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Banyaknya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Banyaknya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD + Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Banyaknya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dalam Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD + Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Banyaknya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD + Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Banyaknya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD + Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Banyaknya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Banyaknya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Tersusunnya seluruh sub kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(\sum dokumen dan pelaporan keuangan yang sesuai parameter) / (\sum dokumen dan pelaporan keuangan yang disusun) x100	persen	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)	Banyaknya Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam Penyediaan Gaji dan Tunjangan pada tahun berkenaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	148
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Banyaknya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Banyaknya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dalam Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan + Triwulanan + Semesteran SKPD dalam Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Tersusunnya seluruh sub kegiatan pada Administrasi barang milik daerah Perangkat Daerah	(\sum dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai parameter)/(\sum dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun) x100	persen	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Banyaknya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dalam Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Banyaknya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dalam Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Banyaknya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dalam Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Banyaknya Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dalam Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tersusunnya seluruh sub kegiatan pada Administrasi kepegawaian	(\sum dokumen administrasi kepegawaian yang sesuai parameter)/(\sum dokumen administrasi kepegawaian yang disusun) x100	persen	100

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Banyaknya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dalam Pengadaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	Banyaknya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Banyaknya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Tersusunnya seluruh sub kegiatan pada Administrasi umum Perangkat Daerah	(\sum dokumen administrasi umum perangkat daerah yang sesuai parameter) / (\sum dokumen administrasi umum perangkat daerah yang disusun) x100	persen	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Banyaknya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Banyaknya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Banyaknya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Banyaknya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Banyaknya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Banyaknya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tersusunnya seluruh sub kegiatan pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(\sum dokumen pengadaan barang milik daerah yang sesuai parameter) / (\sum dokumen pengadaan barang milik daerah yang disusun) x100	persen	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Banyaknya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Paket	3
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Banyaknya Paket Mebel yang Disediakan dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Paket	1
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Banyaknya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	70
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Banyaknya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	4

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya seluruh sub kegiatan pada penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(\sumlaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai parameter)/(\sumlaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun) x100	persen	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya seluruh sub kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(\sumpemeliharaan barang milik daerah yang sesuai parameter)/(\sumpemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan) x100	Persen	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	Banyaknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	Banyaknya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	28
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Banyaknya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Banyaknya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Banyaknya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti	Persentase capaian Pengawasan yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	dokumen pengawasan yang dikeluarkan/jumlah pengawasan yang dilakukan X 100%	persen	100
		2. Persentase ketercapaian penyelenggaraan pengawasan	Temuan hasil pemeriksaan dari Inspektorat maupun BPK yang telah selesai ditindaklanjuti oleh OPD pada tahun yang bersangkutan (tahun n)	kumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tahun n / total rekomendasi tahun n X 100%	persen	100
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase capaian Pengawasan yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	Jumlah LHP yang dikeluarkan / Jumlah pengawasan yang dilakukan X 100%	persen	100
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Banyaknya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	2

	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Banyaknya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Banyaknya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Banyaknya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	2
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Banyaknya Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	2
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Banyaknya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	2
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Banyaknya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Temuan hasil pemeriksaan dari Inspektorat maupun BPK yang telah selesai ditindaklanjuti oleh OPD pada tahun yang bersangkutan (tahun n)	Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tahun n / total rekomendasi tahun n X 100%	persen	80
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Banyaknya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Banyaknya Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	2
Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi terhadap penegakan integritas pada unit kerja serta Reformasi birokrasi pada OPD	jumlah Realisasi kegiatan pada program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi / Jumlah target kegiatan pada program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi X100%	persen	100

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terciptanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	(\sum dokumen rekomendasi kebijakan teknis bidang pengawasan yang direncanakan / (\sum dokumen rekomendasi kebijakan teknis bidang pengawasan yang disusun) x100	Persen	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Banyaknya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4
	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan asistensi terhadap penegakan integritas pada unit kerja serta Reformasi birokrasi pada OPD	Jumlah Realisasi target pada program pendampingan dan asistensi / Jumlah target pada program pendampingan dan asistensi X 100%	Persen	100
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Banyaknya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	-
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Banyaknya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Banyaknya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Banyaknya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	1

Lampiran II Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Banten

Nomor : 060/053 - Inspektorat /2023

Tanggal : 2 Februari 2023

No.	Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
			2023
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan		
	a. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	a. Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal	Nilai	14
	b. Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.1375
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)		
	a. Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1 Unit Kerja

No	Program	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun
			2023
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		a. Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
		b. Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
		c. Persentase ketercapaian Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%
		d. Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%
		e. Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	100%
		f. Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		g. Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
		h. Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	100%
		a. Persentase Ketercapaian Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%
		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	80%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketercapaian perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	100%
		a. Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4 Rekomendasi
		b. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2023

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, perlu meningkatkan indikator kinerja utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja utama pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten ada 4 (empat), yaitu :

- 1) Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD;
- 2) Capaian Maturitas SPIP;
- 3) Capaian Nilai Sakip Komponen Evaluasi Internal;
- 4) Capaian Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya. Akuntabilitas

kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah (Wakhyudi, 2007).

Keberadaan SAKIP sebagai sistem manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia sebenarnya merupakan bentuk amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang didalamnya memberikan amanat untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja dalam sebuah sistem. Evaluasi atas Implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Kategori nilai SAKIP

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
A	>80 ± 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
BB	>70 ± 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
B	>60 ± 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
CC	>50 ± 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

2. Capaian Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian pemerintah dalam mencapai tujuan intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terdiri atas unsur:

1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.

Sedangkan simpulan hasil evaluasi SPIP berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data/informasi, dikategorikan sebagai berikut:

1. Efektif, jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dapat mencegah atau mengendalikan risiko yang akan terjadi, serta capaian kinerja Aktivitas Utamanya adalah di atas 90%.
2. Kurang Efektif, jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan belum sesuai untuk mencegah atau mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja Aktivitas Utamanya adalah di antara 75% s.d 90%.

3. Tidak Efektif, jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan tidak efektif untuk mencegah atau mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja Aktivitas Utamanya adalah 75% ke bawah.

Kategori Level Maturitas SPIP

Level	Definisi	Karakteristik SPIP
0	Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
1	Rintisan	Ada praktek pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terkoordinasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak diidentifikasi
2	Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan pengendalian intern, namun tidak teridentifikasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai
3	Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai
4	Terkelola dan terukur	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi
5	Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

3) Capaian Nilai Sakip Komponen Evaluasi Internal

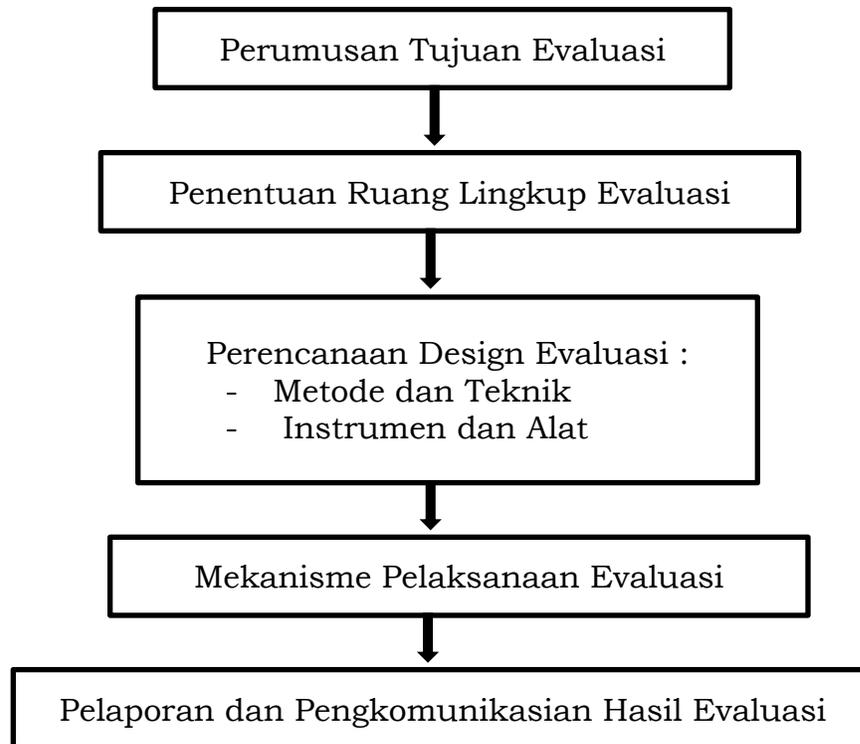
Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:

- memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- menilai tingkat implementasi SAKIP;
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Kerangka logis evaluasi AKIP



4) Capaian Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pembangunan Zona Integritas didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan

WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.

Sebagai langkah awal dicanangkannya suatu unit kerja dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah dengan pembuatan dan penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan dan atau masyarakat, penanda tangan ini merupakan tonggak awal dan merupakan indikator utama dalam penilaian.

Untuk menunjang kegiatan dimaksud peran masyarakat atau pemangku kepentingan diperlukan. Masyarakat diminta berpartisipasi aktif juga untuk melaksanakan pemantauan, penilaian dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Membuat kontrak kinerja yang jelas dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak kinerja dimaksud. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan.

Target dan Realisasi Capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Target Capaian Kinerja Sasaran
Inspektorat Daerah TA. 2023

No.	Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
			2023
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan		
	a. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	a. Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal	Nilai	14
	b. Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.1375
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)		
	a. Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1 Unit Kerja

Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun
			2023
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		a. Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
		b. Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
		c. Persentase ketercapaian Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%
		d. Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%
		e. Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	100%
		f. Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		g. Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	100%
		h. Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	100%
		a. Persentase Ketercapaian Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%
		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	80%
		b. Persentase Ketercapaian Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketercapaian perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	100%
		a. Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4 Rekomendasi
		b. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	100%